

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Untuk mengukur keberhasilan suatu negara salah satunya dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu gambaran keadaan perekonomian yang dapat diukur dari besarnya kenaikan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi pada suatu periode tertentu. Maka dapat diartikan bahwa, nilai dari pendapatan nasional pada suatu periode tertentu ialah gambaran dari keadaan atau kondisi ekonomi secara nasional dan menyeluruh pada suatu periode tertentu. Peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tahun tertentu artinya menunjukkan bahwa adanya juga peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode waktu tertentu.

Disparitas pendapatan sampai masa sekarang masih menjadi permasalahan penting bagi pembangunan perekonomian di setiap negara, disparitas pendapatan ialah perbedaan keadaan ekonomi, kesejahteraan dan pendapatan antar masyarakat yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian dan menekan angka kemiskinan jika tidak dijadikan indikator penting dalam tujuan pembangunan ekonomi yang merata.

Disparitas pendapatan merupakan kondisi ekonomi antar wilayah di Indonesia adalah indikator utama pemerataan daerah yang melibatkan sejauh mana pemerataan terjadi antar wilayah-wilayah bagian Indonesia. Hal terkuat yang menjadi pendorong tingginya tingkat disparitas pendapatan antar wilayah yaitu perbedaan potensi-potensi ekonomi baik dalam aspek sumber daya alam

maupun aspek sumber daya manusia yang dapat menjadi faktor pendorong perekonomian di bagian-bagian wilayah tersebut. Indikator pengukuran disparitas pendapatan ialah jumlah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk untuk mengukur seberapa dalam tingkat disparitas pendapatan.

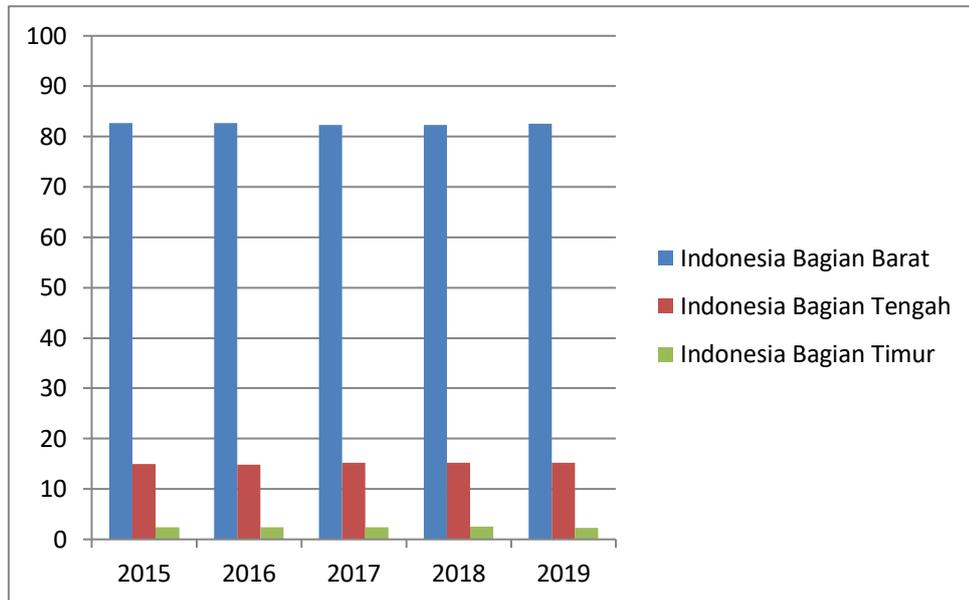
Selain disparitas pendapatan, pengangguran juga menjadi salah satu masalah makroekonomi karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang dan mengakibatkan kemiskinan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya, penyebab pengangguran ialah jumlah pencari kerja yang terus bertambah dan tidak seiring dengan bertambahnya juga lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja.

Kemiskinan ialah masalah perekonomian struktural yang sering dihadapi oleh negara berkembang tak terkecuali juga negara maju. Kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan suatu masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung. Kemiskinan menjadi masalah global yang terus di tekan ke angka yang rendah. Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari PPP\$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari PPP\$2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001 (The World Bank, 2007, Understanding Poverty).

**Tabel 1.1 Distribusi PDRB Indonesia berdasarkan Provinsi di Indonesia**

Provinsi	Distribusi PDRB				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	1,11%	1,08%	1,06%	1,04%	1,02%
Sumatera Utara	4,91%	4,96%	4,98%	4,95%	4,99%
Sumatera Barat	1,54%	1,55%	1,56%	1,54%	1,53%
Riau	5,60%	5,40%	5,13%	5,04%	4,76%
Jambi	1,33%	1,36%	1,38%	1,39%	1,35%
Sumatera Selatan	2,85%	2,80%	2,79%	2,80%	2,83%
Bengkulu	0,43%	0,44%	0,44%	0,44%	0,45%
Lampung	2,17%	2,21%	2,23%	2,23%	2,24%
Kep Bangka Belitung	0,52%	0,52%	0,51%	0,49%	0,47%
Kep Riau	1,71%	1,71%	1,66%	1,66%	1,67%
Sumatera	22,18%	22,04%	21,73%	21,58%	21,31%
DKI Jakarta	17,07%	17,11%	17,21%	17,35%	17,67%
Jawa Barat	13,09%	13,10%	13,01%	13,10%	13,22%
Jawa Tengah	8,68%	8,61%	8,53%	8,47%	8,47%
DI Yogyakarta	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,88%
Jawa Timur	14,52%	14,70%	14,65%	14,62%	14,63%
Banten	4,11%	4,10%	4,10%	4,11%	4,14%
Jawa	58,33%	58,50%	58,38%	58,50%	59,00%
Bali	1,51%	1,54%	1,55%	1,56%	1,57%
Nusa Tenggara Barat	0,91%	0,92%	0,90%	0,83%	0,83%
Nusa Tenggara Timur	0,65%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%
Bali dan Nusa Tenggara	3,07%	3,12%	3,11%	3,05%	3,06%
Kalimantan Barat	1,26%	1,28%	1,29%	1,30%	1,32%
Kalimantan Tengah	0,86%	0,89%	0,92%	0,93%	0,93%
Kalimantan Selatan	1,18%	1,16%	1,16%	1,15%	1,12%
Kalimantan Timur	4,33%	4,03%	4,31%	4,25%	4,07%
Kalimantan Utara	0,53%	0,52%	0,56%	0,57%	0,61%
Kalimantan	8,16%	7,88%	8,23%	8,19%	8,05%
Sulawesi Utara	0,78%	0,80%	0,80%	0,80%	0,81%
Sulawesi Tengah	0,92%	0,95%	0,97%	1,00%	1,03%
Sulawesi Selatan	2,92%	2,99%	3,02%	3,08%	3,14%
Sulawesi Tenggara	0,75%	0,77%	0,78%	0,79%	0,80%
Gorontalo	0,24%	0,25%	0,25%	0,25%	0,26%
Sulawesi Barat	0,28%	0,28%	0,29%	0,29%	0,29%
Sulawesi	5,91%	6,04%	6,12%	6,21%	6,33%
Maluku	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
Maluku Utara	0,23%	0,23%	0,23%	0,24%	0,25%
Papua Barat	0,54%	0,53%	0,52%	0,53%	0,52%
Papua	1,29%	1,37%	1,37%	1,41%	1,18%
Maluku & Papua	2,35%	2,42%	2,42%	2,47%	2,24%

Sumber : BPS, 2021



Sumber :BPS, 2021

**Gambar 1.1 Grafik Distribusi PDRB Indonesia berdasarkan bagian-bagian wilayah pada tahun 2015-2019.**

Dari data pada tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa distribusi PDRB tertinggi untuk perekonomian di Indonesia pada waktu lima tahun terakhir yaitu distribusi berdasarkan wilayah bagian barat Indonesia dengan distribusi PDRB pada tahun 2015 yaitu sebesar 82,63%, kemudian pada tahun 2016 distribusi PDRB meningkat menjadi 82,70% pada tahun 2017 menurun menjadi 82,30% kemudian pada tahun 2018 distribusi PDRB menjadi 82,32% dan pada tahun 2019 distribusi PDRB kembali mengalami peningkatan menjadi 82,57%, wilayah Indonesia bagian barat menjadi penyokong perkembangan perekonomian di Indonesia dengan rincian distribusi berdasarkan provinsi di pulau Sumatera, pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk detailnya distribusi PDRB pulau jawa paling tinggi berasal dari Provinsi DKI Jakarta yaitu pada tahun 2015 distribusi PDRB DKI Jakarta berada pada tingkat 17,07%, kemudian meningkat menjadi 17,11% pada tahun 2016, pada 2017 juga mengalami peningkatan menjadi 17,21% dan pada tahun 2018 dan juga pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 17,35% di tahun 2018 dan 17,67% pada tahun 2019.

Kondisi perekonomian di wilayah Indonesia bagian barat masih mendominasi distribusi perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada wilayah barat Indonesia ini terdapat banyak sektor perindustrian manufaktur maupun sektor pariwisata yang dapat menarik perhatian para investor untuk menginvestasikan aset mereka. Untuk tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di wilayah bagian barat Indonesia masih tergolong cukup tinggi.

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa walaupun hampir seluruh distribusi PDRB didominasi oleh wilayah bagian barat Indonesia tetapi tingkat pengangguran di wilayah tersebut juga cukup tinggi dan menjadi tingkat pengangguran paling tinggi di antara tiga bagian wilayah Indonesia yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur.

**Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Indonesia**

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	17,66	15,7	13,96	12,88	11,65
Sumatera Utara	13,1	12,33	12,01	11,16	10,96
Sumatera Barat	12,88	10,9	11,98	11,34	10,76
Riau	14,55	13,37	11,98	11,53	11,12
Jambi	7,07	8,66	7,54	7,29	7,58
Sumatera Selatan	11,1	8,25	8,19	8,35	8,55
Bengkulu	8,12	7,14	6,55	5,98	5,67
Lampung	8,58	9,16	8,76	8,36	7,98
Kep. Bangka Belitung	9,64	8,77	8,24	7,2	6,9
Kep. Riau	15,25	16,72	13,6	15,34	14,52
DKI Jakarta	15,59	11,89	12,5	12,38	12,04
Jawa Barat	17,12	17,46	16,71	16,45	15,82
Jawa Tengah	10,3	8,83	8,72	8,66	8,63
DI Yogyakarta	8,14	5,53	5,86	6,37	6,07
Jawa Timur	8,78	8,35	8,1	7,68	7,59
Banten	8,13	16,87	17,03	16,19	15,66
Bali	3,36	4,01	2,76	2,28	2,79
Nusa Tenggara Barat	10,67	7,6	7,18	6,86	6,43
Nusa Tenggara Timur	6,95	6,84	6,48	5,67	6,12
Kalimantan Barat	9,93	8,81	8,58	8,27	8,41
Kalimantan Tengah	7,68	8,49	7,36	7,05	7,25
Kalimantan Selatan	7,95	9,08	8,3	8,07	7,59
Kalimantan Timur	14,67	16,81	15,46	13,2	12,59
Kalimantan Utara	11,47	9,15	10,71	9,81	10,33
Sulawesi Utara	17,72	1,4	13,3	12,47	11,18
Sulawesi Tengah	7,09	6,75	6,78	6,49	6,57
Sulawesi Selatan	11,76	9,91	10,38	9,98	9,72
Sulawesi Tenggara	9,17	6,5	6,44	5,96	6,4
Gorontalo	7,71	6,64	7,93	7,08	7,01
Sulawesi Barat	5,16	6,05	6,19	5,34	4,27
Maluku	16,65	14,03	17,06	14,02	1,33
Maluku Utara	11,61	7,44	10,15	9,19	9,77
Papua Barat	12,69	13,19	14,01	9,27	12,24
Papua	7,71	6,32	7,58	5,75	6,73
Indonesia	11,99	11,11	10,83	10,4	10,21

Sumber : BPS, 2021

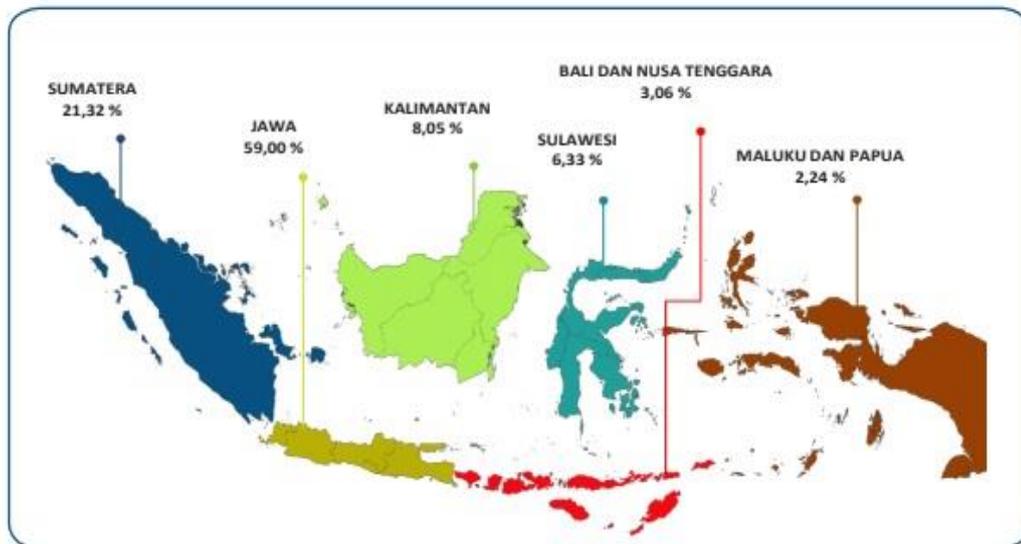
Jumlah TPT pada tahun 2015 di Indonesia yaitu 11,99%, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 11,11%, pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 10,83%, begitu juga pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 10,40% dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 10,21%.

**Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia**

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	171.100	168.975	170.241	167.099	162.920
Sumatera Utara	297.181	290.850	278.044	261.697	254.254
Sumatera Barat	72.914	74.807	72.450	71.037	69.131
Riau	109.431	101.699	101.101	99.470	97.464
Jambi	61.227	58.061	56.516	56.316	54.769
Sumatera Selatan	225.816	219.769	217.368	214.467	214.090
Bengkulu	65.690	65.421	61.960	60.536	60.030
Lampung	226.417	230.938	221.547	218.865	210.514
Kep Bangka Belitung	14.071	14.383	15.029	14.619	13.575
Kep Riau	23.723	23.955	25.380	25.704	25.622
DKI Jakarta	76.759	77.014	78.282	74.538	72.785
Jawa Barat	892.135	839.244	794.285	715.519	677.505
Jawa Tengah	908.282	900.064	864.821	776.462	742.263
DI Yogyakarta	103.579	98.377	95.486	91.035	88.936
Jawa Timur	956.509	934.183	902.228	862.474	816.825
Banten	139.307	131.585	137.487	133.010	129.588
Bali	41.550	35.312	35.661	34.010	32.076
Nusa Tenggara Barat	162.618	159.102	154.190	147.308	144.164
Nusa Tenggara Timur	232.037	230.000	228.553	227.628	227.578
Kalimantan Barat	78.921	77.167	77.624	75.681	74.888
Kalimantan Tengah	29.583	28.095	27.704	27.338	26.583
Kalimantan Selatan	38.760	37.986	38.848	38.404	38.277
Kalimantan Timur	42.288	42.416	43.884	44.129	44.083
Kalimantan Utara	8.062	8.815	9.803	9.994	9.739
Sulawesi Utara	42.569	40.317	39.373	38.236	38.030
Sulawesi Tengah	82.796	83.367	84.114	83.370	81.439
Sulawesi Selatan	166.223	160.384	163.904	157.227	152.738
Sulawesi Tenggara	66.690	65.415	64.487	60.895	60.255
Gorontalo	41.335	40.688	40.628	38.681	37.074
Sulawesi Barat	31.369	29.963	29.923	30.461	30.327
Maluku	65.619	65.951	64.093	63.792	63.720
Maluku Utara	15.255	15.108	15.475	16.339	17.178
Papua Barat	45.090	44.940	44.124	42.814	41.909
Papua	175.736	182.620	180.811	183.285	182.731
Indonesia	5.710.636	5.576.971	5.435.421	5.162.438	4.993.059

Sumber : BPS, 2021

Selain jumlah TPT yang cukup tinggi di Indonesia juga masih memiliki tingkat jumlah penduduk miskin yang juga tergolong cukup tinggi dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 yaitu 5.710.636 jiwa kemudian pada tahun 2016 menjadi 5.576.971 jiwa, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 5.435.421 jiwa, kemudian juga mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 5.162.438 jiwa, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 4.993.059 jiwa.



Sumber : BPS

### **Gambar 1.2 Peranan Pulau dalam Peningkatan PDB di Indonesia**

Disparitas pendapatan antar Provinsi di Indonesia haruslah menjadi salah satu indikator pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang merata guna menekan tingkat disparitas pendapatan ke nilai yang lebih rendah. Disparitas pendapatan antar provinsi berkaitan dengan pengentasan tingkat jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan perbedaan distribusi tingkat pendapatan tertentu, kenaikan

disparitas akan selalu berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran bahasan di atas adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik perekonomian di bagian-bagian wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia?
2. Berapa besar pengaruh disparitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Berapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
4. Berapa besar pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang telah di bahas sebelumnya dan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mempelajari karakteristik wilayah di Indonesia bagian;
  - i. Barat
  - ii. Tengah
  - iii. Timur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh dari disparitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh dari pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh dari kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat, baik bersifat akademis maupun praktis, yaitu :

### **A. Manfaat Akademis**

1. Media untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata.
2. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan akademik dan bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang karakteristik bagian-bagian wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia serta bagaimana pengaruh disparitas pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap perekonomian di Indonesia.

### **B. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan persoalan pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan, tingkat pengangguran dan kemiskinan serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.